

# Political Identity and Political Parties: A Case Study of Ummat Party Political Identity of the 2024 Election

Fadly Fahry S. Wally<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia.  
E-mail: chairilmuda70@gmail.com

---

**Abstract:** *Political identity has become an interesting discourse for debate in the last decade. In today's Indonesia context, identity politics tends to present its own phobia in society, even though we know that political parties were born from a different backgrounds and ideologies that cannot be separated from the influence of identity. On the other side, there is background of the urgency of political identity which is used as a jargon in attracting the sympathy of voters among Muslims. Of course, the phenomenon is interesting to study about what is the actual position of identity in politics and the political parties especially politics in Indonesia which is so plural. This articles aims to present a definition of the meaning of political identity in political parties and when political identity can or cannot be used in politics*

**Keywords:** political identity, Ummah Party, political party

## **1. Pendahuluan**

Francis Fukuyama dalam buku *The Origin of Political Order*, secara alamiah manusia mestilah berpolitik. Ini merupakan konsekuensi dari sifat manusia yang hidup berkelompok. Peradaban manusia kemudian melahirkan “politik” untuk mengatur perbedaan-perbedaan tak terelakkan dalam kelompok. Politik merupakan respons terhadap kesadaran atas perbedaan identitas. Konteks identitas ini luas, mulai dari identitas agama, suku, ras, kelompok kerja, dan lain sebagainya.

Politik identitas merujuk pada upaya membentuk dan mempertahankan ikatan sosial dan politik berdasarkan karakteristik sosial tertentu seperti etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kelas sosial. Fenomena politik identitas dalam dekade terakhir terus menjadi topik utama diskusi di seluruh dunia baik di kalangan akademisi, politisi, maupun masyarakat umum.

Penggunaan politik identitas oleh partai politik maupun aktor atau elite politik tertentu di Indonesia telah menjadi isu yang kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Partai politik memainkan peran penting dalam masyarakat, dengan firma politik partai-partai yang telah secara jelas menentukan posisi mereka terhadap berbagai isu yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Namun, pernyataan politik identitas yang kontroversial atau isu-isu pembangkangan dari partai-partai politik tertentu dapat mengarah ke konflik antara kelompok-kelompok masyarakat.

Zulfan Tadjoeidin (2017), mengatakan, politik identitas adalah fenomena yang umum dalam proses politik, sehingga banyak partai politik di Indonesia telah memanfaatkan isu identitas untuk memperoleh dukungan elektoral. Namun, ia juga menekankan bahwa hal ini dapat mengakibatkan konflik dan memperdalam pembagian sosial. Zulfan menambahkan, dampak negatif dari politik identitas adalah memecah belah komunitas dan menciptakan persaingan dan konflik yang tidak seharusnya terjadi di antara kelompok masyarakat (Zulfan: 2017).

Syamsuddin Haris (2018), mengatakan, bahwa bukanlah sesuatu yang salah jika seorang kandidat atau partai politik berbicara tentang identitas, tetapi ketika seseorang atau partai itu membangun moralitas dan politik atas dasar identitas, itu berarti juga membenci kelompok lain, dan hal tersebut tidaklah etis dan tidak solutif. Haris menyampaikan, partai politik harus menghindari pendekatan politik identitas yang bersifat eksklusif dan diskriminatif.

Sejak era reformasi di Indonesia, politik identitas telah menjadi topik yang sering dibahas dan didebatkan dalam diskursus politik. Beberapa studi kasus politik identitas merujuk pada upaya untuk memperkuat identitas kelompok berdasarkan latar belakang agama, etnis, gender, dan

mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dari kelompok tersebut. Politik identitas seringkali digunakan sebagai alat untuk memperkuat dukungan politik atau sebagai untuk menyerang lawan politik. Kekuatan identitas kelompok juga digunakan untuk membangun legitimasi dan keyakinan dalam masyarakat.

Salah satu studi kasus terkini tentang politik identitas di Indonesia hadir dari salah satu partai peserta pemilu 2024, Partai Ummat. Partai baru yang didirikan pada tahun 2021 tersebut mengusung agenda politik yang didasarkan pada identitas keislaman dengan harapan dapat menarik suara dari kalangan Muslim. Pada Februari 2023 lalu, Partai Ummat melalui Ketua Umumnya, Ridho Rahmadi, dengan tegas menyampaikan bahwa Partai Ummat akan mengusung politik identitas dalam pemilu 2024.

Pendekatan identitas keislaman oleh Partai Ummat ini mendapatkan sorotan dari banyak kalangan, baik dari politisi maupun akademisi. Beberapa pihak menilai pemanfaatan identitas keislaman oleh Partai Ummat dalam visi politiknya merupakan bentuk instrumentalisme politik yang membahayakan bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia. Sebab terdapat dimensi identitas keislaman yang meluas pada hal-hal yang bersifat dogmatic dan fundamentalistis. Akan tetapi, politik identitas juga dinilai sebagai kewajaran dalam konteks politik modern saat ini. Merujuk uraian pendahuan di atas, maka rumusan permasalahan artikel ini berkenaan dengan relasi politik identitas dan partai politik dengan studi kasus politik identitas oleh Partai Ummat menjelang pemilu tahun 2024.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya maka tulisan ini akan menganalisis lebih jauh tentang konteks politik identitas yang digunakan oleh Partai Ummat dan pemaknaan terkait dengan politik identitas dalam situasi politik modern.

## **2. Metode**

Studi ini menggunakan metode studi pustaka, analisis deskriptif, dan analisis bacaan dari media massa. Merujuk prosesi tersebut maka penulis akan menggunakan studi kualitatif dalam menguraikan dan memaparkan data.

### **KERANGKA TEORI**

Maurice Duverger (1963) dalam bukunya *“Political Parties”*, menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang memberikan peluang partisipasi, membentuk struktur politik, dan mempresentasikan alternatif politik. Giovanni Sartori (2005), memfokuskan pembahasan tentang elemen-elemen penting dalam partai politik, yaitu pemilih, kandidat, agenda partai, dan struktural internal.

Partai politik dalam secara ideologi dan dalam kontestasi politik kerap menggunakan politik identitas sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dukungan publik. Menurut Teun Pauwels dan Isabel Awad (2020) dalam artikelnya *“The Influence of identity and Emotions on Political Party Preferences”*, menemukan bahwa identitas pemilih berperan dalam mempengaruhi dukungan mereka terhadap partai politik. Pemilih mengidentifikasi diri mereka

dengan kelompok tertentu dan mendukung partai politik yang berbicara tentang isu-isu yang penting bagi kelompok mereka.

Sementara Michel Hanchard (1999) dalam bukunya “The Politics of Identity: Ethnic Nationalism and the State in Africa”, mengemukakan partai politik dapat menjadi pelopor dalam memperkokoh identitas kelompok tertentu. Hanchard menemukan bahwa beberapa partai politik di Afrika misalnya, mengadopsi politik identitas sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaan. Partai politik menggunakan identitas kelompok dalam kampanye untuk memperkuat dukungan dari kelompok tertentu (Pauwels: 2020).

Yeni Sri Lestari dalam artikelnya “Politik Identitas di Indonesia: Agama Nasionalisme dan Agama” menerangkan kajian politik secara jelas membedakan antara identitas politik (*political identity*) dengan politik identitas (*political of identity*). *Political identity* diartikan sebagai konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik. Sedangkan *political of identity* merupakan mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan mempengaruhi dukungan mereka terhadap partai politik. Pemilih mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok tertentu dan mendukung partai politik yang berbicara tentang isu-isu yang penting bagi kelompok mereka .

sarana politik (Muhtar Haboddin, 2012). Kajian mengenai politik identitas meliputi dua kategori identitas yang diakui yaitu identitas sosial dan identitas agama sebagai subjeknya. Stuart Hall (1997), dalam artikelnya berjudul “The Work of Representation”, menjelaskan tentang bagaimana identitas etnisitas, gender, dan ras bermuara pada politik identitas dan perepresentasian politik. Hall memandang identitas sebagai konstruksi sosial yang terus berubah seiring dengan pergeseran budaya dan politik. Hall juga menekankan pentingnya memahami identitas sebagai hasil interaksi yang kompleks antara faktor-faktor seperti sejarah, kuasa, dan adanya kepentingan yang berbeda-beda. Francis Fukuyama mengatakan politik identitas cenderung berakar pada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi seiring dengan pergeseran hubungan kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat.

Dalam kaitannya antara partai politik dan politik identitas, beberapa ahli mengatakan keduanya berkaitan erat karena partai politik seringkali memanfaatkan isu identitas untuk memperoleh dukungan elektoral. David Art (2011), berpendapat bahwa, identitas politik seperti etnisitas, agama, gender, dan orientasi seksual semakin menjadi sumber dari basis dukungan partai politik di banyak negara. Cas Mudde (2019), memperjelas bahwa partai politik biasanya menggunakan isu identitas umumnya untuk memperlebar basis elektoral mereka. Dalam hal-hal seperti jenis kelamin atau orientasi seksual, kontes elektoral dapat berlangsung antara partai yang masing-masing melakukan tawaran untuk mewakili kelompok tersebut.

Pandangan berbeda datang dari Paul Sniderman dan Louise Cainkar (2012), keduanya menekankan bahwa penggunaan identitas dalam politik tidak selalu memiliki hasil seperti yang diinginkan. Mereka berpendapat, ketika partai politik sangat fokus pada identitas, partai tersebut seringkali menarik keluar patriotism dan kebanggaan etnis atau agama yang hanya

memperdalam keretakan etnis dan agama. Hal ini kemudian menyebabkan partai politik menjadi lebih terpisah dengan dikotomi konflik dan kurang mampu menangani banyak masalah yang dihadapi masyarakat di seluruh kalangan etnis atau agama.

### **3. Pembahasan**

#### **POLITIK IDENTITAS PARTAI UMMAT**

Politik identitas menjadi salah satu isu sentral dalam perpolitikan Indonesia beberapa tahun terakhir. Dalam Pemilu 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, dan terakhir pemilu 2019. Di dalam proses kampanye jargon identitas ini sampai merambah untuk sebutan pendukung pasangan calon tertentu. Misalnya istilah “cebong” vs “kampret” yang pernah ramai sepanjang proses pemilu 2019. Cebong merujuk kepada pendukung Jokowi-Ma’ruf dan Kampret bagi pendukung Prabowo-Sandiaga. Kedua kata tersebut memiliki konotasi negatif satu sama lain. Identitas tersebut merujuk kepada primordialisme agama.

Fitri Ramdhani Harahap (2014) dalam artikelnya berjudul “*Politik Identitas Berbasis Agama*”, mengemukakan bahwa kemajemukan identitas di Indonesia terancam dengan adanya politik identitas yang mengarah kepada penghancuran integritas kehidupan beragama yang telah lama dipertahankan. Politik identitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara membentuk dominasi arus besar untuk sebuah kepentingan kelompok yang memeras dan menyingkirkan kelompok lawan atau kelompok minoritas. Politik identitas yang mendominasi Indonesia saat ini adalah politik identitas keagamaan yang menghadirkan eksklusivisme kelompok mayoritas muslim di Indonesia. Hal ini juga diperkeruh dengan dinamika politik Indonesia yang cenderung menggunakan isu-isu agama untuk mempertahankan kekuasaan politik dan cenderung menimbulkan konflik-konflik sosial keagamaan.

Merujuk situasi politik terkini, politik identitas nampaknya cenderung menguat, alih-alih memudar seiring berlalunya pilpres 2019. Teranyar, Partai Ummat sebagai pendatang baru di gelanggang perpolitikan nasional dengan gamblang mengangkat politik identitas sebagai jargon politiknya. Ketua Umum DPP Partai Ummat, Ridho Rahmadi, menyatakan secara tegas partainya mengusung politik identitas. Menurutnya, berpolitik dengan mengusung identitas Islam merupakan salah satu strategi partai besutan Amien Rais itu untuk memenangkan Pemilu 2024. “Kami akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas”, begitulah kira-kira ucapan lantang Ridho dapat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pertama Partai Ummat bertempat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta (13/2/2023).

Ridho menjelaskan partainya bersikap demikian karena narasi menantang politik identitas adalah wacana menyesatkan. Sebab, menantang politik identitas berarti sama saja dengan menghilangkan moralitas agama dalam dunia politik. Akibatnya politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional. Lanjutnya, wacana menentang politik identitas adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama dipisahkan dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami, bahwa sesungguhnya, justru politik identitas adalah politik yang Pancasila. Ridho mengacu pada sila pertama pada Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan begitu, sebagai manusia yang berkeTuhanan sudah sepatutnya tidak melepaskan titah Tuhan di dalam membangun kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Pada dasarnya politik gagasan yang diangkat Partai Ummat adalah penegasan integrasi akan hal-hal ihwal yang tak bisa dilepaskan dari politik itu sendiri. Politik tidak bisa dilepaskan dari pengaruh agama, begitu kira-kira. Partai Ummat memandang nilai-nilai moralitas agama memberikan referensi yang absolut dan permanen yang tidak pernah berubah lintas zaman dan lintas generasi. Lebih jauh Ridho menyampaikan, memisahkan agama dari politik akan membuat politik menjadi tanpa arah. Dengan begitu kebenaran yang berlaku ialah kebenaran yang relatif situasional.

Sekretaris Majelis Syuro Partai Ummat, Ansufr Idrus Sambo mengantakan konteks politik identitas yang diusung Partai Ummat merupakan landasan perjuangan dalam Islam yang Rahmatan Lil Alamin. Menurutnya, Islam di sini adalah landasan vertikal di mana pertanggungjawaban perjuangannya bukan kepada manusia tetapi kepada Allah, dengan nilai Islam yang mengikatnya. Mereka merujuk Al Quran dan Sunnah sebagai pedoman sebagaimana keyakinan umat Muslim. Dapat dikatakan Partai Ummat hadir untuk merepresentasikan ajaran-ajaran Islam di tengah masyarakat melalui politik sebagai sarannya.

Langkah Partai Ummat menggunakan politik identitas ini tergolong keputusan yang berani dan *anti-mainstream*. Alasan jelas bahwa sentimen negatif terhadap politik identitas cukup deras di kalangan masyarakat dan politisi. Bahkan beberapa partai dengan latar belakang identitas agama tidak dengan gamblang mengangkat isu identitas agama dalam kampanye mereka. Sebagai partai baru, apa yang dilakukan Partai Ummat memecah keriuhan politik menjelang Pemilu 2024.

Penggunaan politik identitas oleh Partai Ummat telah menjadi perdebatan yang berkembang di Indonesia, terutama menjelang pemilu 2024. Terdapat pandangan yang mendukung penggunaan politik identitas tersebut yang berpotensi membantu partai memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok Islam tertentu. Namun, pernyataan

kontra dan penolakan juga bermunculan, yang memandang bahwa penggunaan politik identitas dapat memecah belah masyarakat.

### **3.1. Mereka yang Kontra Politik Identitas Partai Ummat**

Penggunaan politik identitas Partai Ummat tersebut menuai reaksi pro dan kontra di kalangan politisi dan pengamat politik. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menganggap Partai Ummat tidak memahami aspek-aspek fundamental pembentukan bangsa Indonesia karena menyatakan bakal mengusung politik identitas pada penyelenggaraan pemilu (Kompas, 19/2/2023). Menurut Hasto, partai politik seharusnya memahami sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia dan memahami ideologi Pancasila. Ia meyakini politik identitas yang diusung oleh Partai Ummat tidak akan mendapatkan tempat. Terlebih, eksploitasi politik identitas pada Pemilu 2019 masih menciptakan bekas yang belum betul-betul pulih di kalangan masyarakat.

Komentar juga datang dari Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja (detiknews.com, 21/2/2023). Rahmat mengatakan pihaknya akan memberi teguran keras untuk partai yang mengedepankan politik identitas. Ia mengatakan kita punya keprihatinan dan *concern* bersama untuk tidak menggunakan politisasi identitas. Menurutnya, Indonesia memiliki beragam agama, sehingga tidak patut untuk saling meniadakan. Partai politik harus semakin bijaksana untuk tidak menggunakan politik identitas. Termasuk penggunaan tempat ibadah sebagai alat kampanye.

Politik identitas Partai Ummat ini disertai dengan perdebatan yang mengemuka, terutama anggapan yang menyatakan bahwa politik identitas adalah sumber munculnya polarisasi, konflik, dan diskriminasi dalam masyarakat. Kondisi ini menjadi kecemasan dalam politik Indonesia yang terdiri dari identitas masyarakat yang begitu majemuk. Menurut para pengkritiknya, politik identitas yang dimainkan oleh Partai Ummat terlihat memberikan sinyal perpecahan atau bahkan menggemukkan dan menempatkan kelompok satu sama lain dalam nuansa kebencian.

### **3.2. Mereka yang Pro Politik Identitas Partai Ummat**

Di samping mereka yang kontra dan memprotes keras penggunaan politik identitas sebagai visi kampanye politik, terdapat sejumlah kalangan yang justru mendukung dan tidak mempermasalahkan hal itu. Dilansir Sindonews.com (25/2/2023), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai politik identitas yang digaungkan oleh Partai Ummat tidak masalah. Menurutnya, mengkampanyekan politik identitas melalui masjid-masjid, itu tidak apa-apa. Hal itu untuk menyadarkan umat Islam agar menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bagian dari politik inspiratif.

Anies Baswedan sebagai tokoh yang sering diidentikkan dengan pelabelan politik identitas mengungkapkan, dirinya lebih memandang penggunaan politik identitas dengan menunjukkan kenyataan daripada pernyataan. Menurutnya kenyataan akan memiliki efek persepsi yang lebih kuat dari pernyataan. Ketika berjuang membawa narasi keadilan maka identitas apapun menginginkan hadirnya rasa keadilan. Dirinya mengambil contohnya bagaimana kinerjanya selama 5 tahun di DKI Jakarta yang melawan stigma negatif politik identitas dengan pembuktian nyata.

Sebagai partai yang mengutamakan identitas Islam, Partai Ummat mencoba menarik perhatian kelompok pemilih Muslim yang terkadang merasa tidak diwakili oleh partai-partai Islam terdahulu. Semisalnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang lebih dulu dikenal sebagai partai berbasis identitas keislaman, namun kini cenderung dinilai tidak cukup keras dalam memperjuangkan isu Islam.

Hal ini menunjukkan adanya potensi bagi pemilih kalangan Muslim dapat beralih dukungan ke Partai Ummat sebagai partai alternatif yang lebih dapat diandalkan dalam memperjuangkan isu-isu Islam. Selain itu, beberapa kalangan memandang penggunaan politik identitas oleh Partai Ummat ini sebagai kampanye inklusif, di mana tokoh-tokoh dari kelompok minoritas yang seringkali diabaikan atau tidak diakomodasi dalam politik pemerintahan, dapatkan diterapkan dan didorong bergabung dan memperoleh ruang penjelasan tentang identitas mereka. Sehingga pada akhirnya, penggunaan politik identitas demi mengangkat suara yang kurang terdengar ini dapat dianggap sebagai tindakan yang wajar dalam rangka menjadi lebih inklusif.

#### **4. ANALISIS**

##### **Narasi Politik Identitas yang Salah Kaprah**

Permasalahan utama dari penggunaan politik identitas adalah politik kebencian. Ketika identitas justru digunakan sebagai narasi pembenaran untuk menyerang kelompok yang memiliki identitas berbeda. Fukuyama (2018) dalam bukunya "*Identity: The Demand for Dignity and The Politics of Resentment*", menjelaskan tantangan utama demokrasi saat ini adalah tumbuh suburnya politik kebencian akibat penetrasi internet dan media sosial. Politik kebencian (*politics of resentment*) adalah fenomena politik ketika identitas selain diri atau kelompoknya ingin dihilangkan.

Fenomena politik identitas di Indonesia belakangan cenderung merambah pada narasi-narasi negatif yang saling menyerang dan menjatuhkan melalui fakta identitas tersebut. Narasi tersebut dengan cepat menyebar lewat pengaruh penggunaan media sosial. Dari kacamata linguistik, politik identitas telah mengalami peyorasi makna atau maknanya menjadi negatif. Karena masif diidentikkan kemudian dilihat sebagai terminologi yang haram digabungkan.

Politik identitas sering dinarasikan secara negatif karena dianggap menimbulkan konflik dan divisif dalam masyarakat. Namun di lain sisi, pewacanaan politik identitas juga dapat digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat yang selama ini terpinggirkan atau kurang mendapatkan perhatian. Penekanan identitas tertentu dapat membantu memperjuangkan hak asasi manusia dan hak-hak minoritas serta melawan diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat.

#### **4.1. Pandangan terkait Politik Identitas Partai Ummat**

Politik identitas memang tidak bisa dihindari dalam kehidupan politik, namun dalam memaknai politik identitas perlu dimaknai dengan bijak untuk menghindari penggunaannya dengan berlebihan dan berpotensi memecah belah masyarakat. Penting untuk memahami bahwa identitas individu maupun kelompok bukanlah sesuatu yang tunggal dan statis, melainkan bisa berubah dan saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, harus senantiasa mengedepankan nilai-nilai inklusif dan bersifat mengakomodasi, serta menjunjung tinggi keadilan sosial.

Dalam konteks Partai Ummat, penekanan pada identitas agama Islam, dikhawatirkan berdampak polarisasi di antara warga negara yang berbeda agama dan bisa memperkeruh keadaan. Tanpa kerangka politik yang kuat yang menempatkan ideologi keagamaan dalam kerangka inklusif dan demokratis, pandangan 'keislaman' dapat dengan mudah menjadi basis bagi pemisahan diri, intoleransi, dan tindakan radikal. Penggunaan politik identitas berlebihan bisa menjadi ancaman bagi stabilitas dan persatuan bangsa seperti yang dikemukakan Arbi Sanit.

Selain itu, penekanan pada identitas agama Islam juga dapat menimbulkan kesan bahwa Partai Ummat tidak berupaya menangani permasalahan sosial, politik, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya, tetapi hanya berfokus pada isu-isu keagamaan. Padahal, dalam sistem demokrasi, partai politik seharusnya juga memiliki perhatian pada permasalahan umum yang dihadapi masyarakat. Penggunaan identitas agama sebagai basis visi politik juga bisa secara tidak langsung menjebak individu dalam batas-batas identitas yang sempit, dan membatasi kebebasan untuk berpikir dan bertindak secara independen. Sementara, Indonesia yang merupakan negara multikultural, seperti ini justru membutuhkan perspektif yang inklusif dan menjunjung tinggi persatuan. Dalam hal ini, visi partai politik di masa yang akan datang haruslah lebih inklusif, demokratis dan mampu mengikuti perkembangan zaman dan memperhatikan permasalahan semua golongan masyarakat.

Politik identitas bisa digunakan ketika ada isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak dan kepentingan kelompok atau individu tertentu yang memang perlu diperjuangkan.

Misalnya, politik identitas dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, minoritas agama, dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Sebaliknya, politik identitas tidak boleh digunakan sebagai alat untuk memperkeruh suasana politik dan memperkuat polarisasi. Selain itu, perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari penggunaan politik identitas, khususnya dampak bagi hubungan sosial di masyarakat. Pemaknaan politik identitas perlu dihindari dari sifat diskriminatif dan hanya memperkuat atau menguntungkan kelompok tertentu saja.

Pada akhirnya, politik identitas di satu sisi dapat digunakan dalam rangka memperjuangkan hak-hak kelompok tertentu asal tidak memicu disintegrasi dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Memaknai politik identitas dengan bijak dan berperspektif nasionalisme menjadi kunci utama dalam penggunaannya.

## **5. Simpulan**

Politik identitas pada akhirnya mengarahkan manusia untuk menentukan sikap dan cara pandang dalam memandang sejauh mana dan kapan identitas digunakan, serta dengan tujuan apa. Seperti pandangan Francis Fukuyama (2018), dalam bukunya *"Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment"*, di mana Fukuyama membahas betapa kuatnya peran identitas dalam politik modern, ketika individu dan kelompok semakin menuntut pengakuan dan perhatian atas identitas mereka. Fukuyama menggambarkan identitas sebagai hal yang esensial bagi martabat dan manusia dan menyarankan bahwa kebutuhan akan pengakuan identitas bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Namun, ia juga menyoroti bahaya yang ditimbulkan penggunaan negatif dari politik identitas, seperti pembangkangan terhadap masyarakat yang lebih luas dan pemusatan perhatian pada perbedaan yang memicu konflik dan disintegrasi. Fukuyama menyarankan bahwa solusi untuk politik identitas harus mencakup pendekatan yang berasal dari nilai universal dan perspektif yang inklusif terhadap berbagai identitas yang ada.

Di Indonesia, dalam sejarahnya telah mempertahankan keberagaman di tengah perbedaan etnis, agama, dan budaya. Tidak dapat dipungkiri, fenomena politik identitas cenderung memperlihatkan tren polarisasi dan diskriminatif. Maka, dalam menanggapi fenomena yang sudah terlanjur berkembang ini, diperlukan keterlibatan segenap elemen masyarakat dan dibarengi dengan nilai-nilai kebangsaan yang kokoh seperti Pancasila dan UUD 1945 dalam menjaga dan memupuk kerukunan serta kesetaraan hak dan kesempatan sosial dan politik dalam masyarakat. Terdapat dua indikator penting untuk menjamin terciptanya kerukunan tersebut, yakni pendidikan, dan adanya kesadaran hukum.

## Referensi

- Febryan. 2023. Partai Ummat: Kami Adalah Politik Identitas. <https://news.republika.co.id/berita/rq0jus436/partai-ummat-kami-adalah-politik-identitas>. Diakses pada 19 Februari 2023.
- Fukuyama, Francis. 2018. *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. Farrar, Straus and Giroux: New York.
- Harahap, FR. 2014. *Politik Identitas Berbasis Agama. Prosiding Sosiologi Konflik dan Politik Identitas*:Yogyakarta.
- Heny Rachma. 2023. Saat Partai Ummat Tegaskan Usung Politik Identitas & Anies Baswedan Pilih Kenyataan. <https://www.merdeka.com/politik/saat-partai-ummat-tegaskan-usung-politik-identitas-amp-anies-baswedan-pilih-kenyataan.html> merdeka.com (16/2/2023). Diakses pada 19 Februari 2023
- Lestari, Yeni Sri. 2018. Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama. Universitas Brawijaya: *Journal Politics and Policy*. Volume 1 No.1, Desember 2018.
- Ma'arif, Ahmad Syafii. 2012. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Yayasan Abad Demokrasi: Jakarta.
- Pauwels, T & Awad, I. (2020). *The Influence of Identity and Emotions on Political Party Preferences*. Politics, Grups, and Identities.
- R53. 2023. Partai Ummat sedang Bunuh Diri. <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/partai-ummat-sedang-bunuh-diri/>. Diakses pada 19 Februari 2023
- Sniderman, P. M., & Cainkar, L. 2012. *Arabs and Muslims in the Media: Race and Representation After 9/11*. NYU Press: New York.
- Wingarta, I Putu Sastra. 2021. *Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia*. Lemhannas RI.